

## SINOPSIS

Dewasa ini perbincangan tentang otonomi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih terus berlangsung dan mendapat perhatian yang serius. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana, tanggungjawab serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Sejalan dengan itu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung dengan adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah adalah salah satu instansi pelaksana di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah berkaitan langsung dengan upaya daerah dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama pemasukan yang berasal dari PAD. Selain itu dinas ini bertugas sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah merupakan ujung tombak pelaksana otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah. Tentunya akan sangat menarik untuk mengetahui *bagaimana implementasi kebijakan peningkatan pajak daerah kabupaten seruyan tahun 2008 – 2009? Dan faktor – faktor apasaja yang berpengaruh terhadap kebijakan peningkatan pajak daerah kabupaten Seruyan?*

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif, adalah hal ini studi kasus implementasi kebijakan peningkatan pajak daerah kabupaten Seruyan tahun 2008 - 2009 . Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi. Hal ini dapat diamati dari pelaksanaan peningkatan pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

Dari hasil penelitian di dapat bahwa dari tahun ke tahun peningkatan pajak di kabupaten Seruyan mengalami kenaikan yang baik namun memang belum stabil hal ini dikarenakan masih ada petugas pajak dan wajib pajak melakukan negosiasi untuk mengurangi pembayaran pajak. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan penigkatan pajak di karenakan belum terlaksana dengan baiknya kebijakan – kebijakan yang telah di buat serta kurangnya SDM dan sarana prasarana yang dapat mendukung terlaksananya kebijakan – kebijakan dengan baik. Namun dengan demikian Dinas Pendapatan Daerah selalu melakukan pembenahan dari tahun ke tahun agar dapat tercapai tujuan dari Dispenda kab Seruyan. Penggalan sumberdaya alam yangdi miliki kabupaten Seruyan sangat besar manfaatnya dalam menunnjang peningkatan pajak serta pendapatan daerah. Faktor komunikasi antara pemerintah daerah dam masyarakat juga menjadi salah satu kendala penyebab kurang efektifnya kebijakan yang dibuat.

Penyusun berharap dengan adanya penelitian ini Dinas Pendapatan Daerah sebagai ujung tombak pelaksana otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah dapat berbenah terutama dari segi SDM dan sarana prasarana serta agar selalu menjaga komunikasi yang baik kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan wajib pajak tanpa harus di paksa membayar karena pajak adalah dari masyarakat kembali ke masyarakat.